

## **BAB IV**

### **UPAYA *CONSTRUCTIVE ENGAGEMENT* DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA UNTUK MENDUKUNG DEMOKRATISASI DI MYANMAR**

Sejak masa pemerintahan militer dimulai, beberapa anggota dari komunitas internasional telah mengadopsi berbagai kebijakan luar negeri dan strategi terhadap Myanmar dengan tujuan untuk mempengaruhi perubahan sistem politik di negara tersebut. Beberapa negara menggunakan kebijakan disinsentif seperti pemberian sanksi embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa hingga pemutusan kontak diplomatik sebagai bentuk aksi protes mereka terhadap pelanggaran dalam penegakkan demokrasi dan HAM di Myanmar. Sementara itu bagi aktor lain seperti ASEAN berkomitmen untuk secara berkelanjutan berkontribusi dalam menyelesaikan masalah negara anggotanya dengan strategi “*Asean way*” yang diyakini dapat secara bertahap mendukung proses demokrasi di Myanmar (Hongwei, 2012) Bukan hanya ASEAN, Indonesia sebagai negara yang memiliki kemiripan historis dengan Myanmar juga mencoba untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dan melakukan pendekatan dengan cara-cara yang konstruktif melalui penerapan strategi *constructive engagement* terhadap Myanmar.

*Constructive Engagement* menjadi pilihan strategis bagi Pemerintah Indonesia dalam mendukung demokratisasi di Myanmar, hal ini dikarenakan keputusan untuk menggunakan strategi *Constructive Engagement* tidak terlepas langkah Indonesia untuk turut menerapkan nilai “*Asean Way*” yang merupakan bentuk diplomasi yang diterapkan antara negara anggota ASEAN. dan dalam hal ini *Constructive Engagement* merupakan subset dari “*ASEAN way*” yang ditunjukkan oleh komunitas regional ASEAN terhadap Myanmar dalam merespon perkembangan demokrasi dan HAM di negara tersebut.

Pemilihan penggunaan *Constructive Engagement* sebagai strategi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Myanmar lahir dari pertimbangan preseden regional yang menekankan pada prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara anggota, adanya konsensus regionalisme antara anggota ASEAN dan rasa tanggung jawab Indonesia yang tidak dapat membiarkan persoalan kemanusiaan dan demokrasi di Myanmar terus terjadi. Pemerintah Indonesia sendiri merefleksikan nilai “ASEAN way” dalam strategi *Constructive Engagement* melalui penggunaan metode dialog, konsultasi serta kerjasama yang bersifat inklusif guna menghindari terjadinya konfrontasi dengan pemerintah Myanmar.

#### **A. Strategi *Constructive Engagement* Indonesia Dalam Mendukung Demokratisasi Myanmar**

Hingga saat ini Pemerintah Indonesia secara berkesinambungan dan konsisten menerapkan kebijakan *Constructive Engagement* terhadap Myanmar guna mewujudkan tujuan politik luar negeri untuk mendukung demokratisasi. Pemerintah Indonesia di sisi lain merasa perlu untuk memastikan bahwa Myanmar dapat menjalankan langkah-langkah demokrasi dan reformasi secara berkesinambungan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia sangat menekankan terciptanya konsolidasi demokrasi dalam negeri Myanmar, pengembangan kerja sama ekonomi, tertatasinya konflik komunal secara adil, bijak serta memperhatikan sisi kemanusiaan. (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015). Secara garis besar strategi ini telah menghasilkan berbagai upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui pelaksanaan hubungan diplomatiknya dengan Myanmar, yang dilaksanakan dengan; memberikan pendampingan dalam proses transisi politik melalui pendekatan bilateral serta multilateral yang terlihat dari pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) dan kontribusi aktif Institute for

Peace and Democracy (IPD) dalam membangun kembali nilai-nilai demokrasi di Myanmar, pelaksanaan kesepakatan kerangka kerjasama ekonomi dengan Myanmar sebagai salah satu upaya dalam mendukung terciptanya pembangunan nasional dalam negeri Myanmar, serta dengan melaksanakan misi diplomasi kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu menangani isu krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar yang diketahui telah mempengaruhi jalannya proses demokrasi di Myanmar.

*Constructive engagement* sebagai sebuah metode kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia dirumuskan dengan mempertimbangkan situasi yang dihadapi oleh Pemerintah Myanmar terutama terkait dengan kemunculan berbagai tekanan-tekanan dari luar sebagai bentuk respon dunia internasional terhadap permasalahan dalam negeri Myanmar. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah Indonesia untuk menerapkan sebuah pendekatan yang berbeda terhadap Myanmar. Seperti yang telah diketahui bahwa Myanmar merupakan partner kerja sama ekonomi dengan China, India, Jepang dan ASEAN. Sehingga hal ini yang menyebabkan upaya yang bersifat konfrontatif seperti pemberian sanksi ekonomi dari negara-negara barat tidak memberikan dampak yang cukup besar bagi junta militer yang berkuasa. Namun di sisi lain sanksi ekonomi dan suspensi bantuan kemanusiaan dari negara-negara barat berdampak terhadap kehidupan masyarakat biasa di Myanmar yang berlawanan dari rezim militer. Menyadari dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan sanksi dan isolasional, Pemerintah Indonesia kemudian mengarahkan kebijakan politik luar negeri untuk lebih menekankan pada upaya-upaya yang dapat membantu Myanmar mengembangkan kebijakan distribusi kekayaan dengan lebih baik dan menghadirkan program bantuan sosial yang adil serta bijaksana.

## **B. Bentuk Upaya *Constructive Engagement* Pemerintah Indonesia Dalam Mendukung Demokratisasi Myanmar**

Pemerintah Indonesia merefleksikan strategi *Constructive engagement* ke dalam berbagai bentuk upaya kebijakan dan metode pendekatan yang diyakini dapat menjadi sarana untuk mensukseskan pelaksanaan politik luar negerinya, yakni melalui: pendekatan politik secara bilateral maupun multilateral melalui pelaksanaan Bali Democracy Forum dan Institute For Peace and Democracy, penyelenggaraan kesepakatan kerjasama ekonomi dalam bentuk *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) dan penandatanganan *Framework Agreement on Trade and Investment between The Republic of The Union of Myanmar and The Republic of Indonesia*, serta melalui program bantuan kemanusiaan dalam mendukung penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar, di bawah ini merupakan penjelasan mengenai upaya *Constructive engagement* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Myanmar:

### **1) Melaksanakan pendekatan politik melalui Bali Democracy Forum dan Institute For Peace and Democracy**

Melalui penyelenggaraan Bali Democracy Forum pemerintah Indonesia menargetkan untuk dapat turut berpartisipasi dalam mendukung proses demokrasi di Myanmar. Dalam pelaksanaannya BDF juga didukung oleh Institute For Peace and Democracy yang merupakan sebuah inisiatif dari pemerintah Indonesia yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang bertujuan secara aktif memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi serta dapat dipahami sebagai bagian dari peran politik luar negeri Indonesia dalam membentuk institusi internasional (Sidauruk, 2015). Forum ini bersifat inklusif, ditandai

dengan kehadiran dari negara-negara yang tidak menganut sistem demokrasi atau yang sedang menempuh proses transisi politik menuju negara demokratis seperti halnya Myanmar yang hingga saat ini masih berada dalam proses transisi politik.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa BDF merupakan bagian dari strategi atau upaya dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang juga dikenal sebagai bentuk diplomasi persuasive yang mengadopsi pendekatan *Constructive engagement* dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini diketahui bahwa terdapat peran penting dialog dan komunikasi dalam diplomasi untuk memahami bagaimana suatu negara mewujudkan kepentingan nasionalnya (Westhuizen, 2014). Di samping itu Penyebaran nilai-nilai Demokrasi melalui BDF menekankan pada prinsip *homegrown democracy* dimana prinsip ini digunakan karena tiga faktor utama yaitu, *pertama*, karena adanya kesepakatan atas prinsip *non-interference* di antara negara-negara ASEAN. Prinsip ini melarang negara sesama anggota untuk saling melakukan intervensi, dan memberikan kebebasan bagi negara-negara anggota untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara tanpa campur tangan dari negara lain, yang mencerminkan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara. Oleh sebab itu kebijakan politik luar negeri Indonesia juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip tersebut. (Wakhidah, 2014)

Sementara itu, sejak awal dibentuknya BDF, Myanmar diketahui selalu menghadiri forum tersebut sepanjang tahun 2008 hingga 2014. Dapat dikatakan bahwa BDF secara bertahap mulai mempengaruhi proses demokrasi yang terjadi di Myanmar, hal ini pun turut dirasakan oleh Myanmar yang memandang pentingnya BDF terutama karena tema yang diusung

oleh BDF menjadi fase penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan domestik yang terjadi di negaranya. Tema yang diusung BDF berlandaskan pada agenda strategis atau mengangkat isu-isu yang terjadi di Kawasan.

**Tabel 1. TEMA DAN PEMBAHASAN BDF DARI TAHUN 2008-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Tema</b>	<b>Pembahasan</b>
2008	<i>Building and Consolidating Democracy: a Strategic Agenda for Asia</i>	Menyetujui Asian Values sebagai nilai dasar demokrasi Asia serta menolak gagasan yang menyatakan bahwa demokrasi milik barat dan mendorong agar demokrasi dibangun dari kesadaran nilai dan norma yang dianut masing-masing negara
2009	<i>Promoting Synergy between Democracy and Development in Asia: Prospects for Regional Cooperation</i>	Mendiskusikan hubungan antara demokrasi dan pembangunan dimana demokrasi diketahui sebagai sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum, kesetaraan ekonomi, partisipasi politik dan ekonomi sebagai instrument penting bagi pembangunan negara
2010	<i>Democracy and The Promotion In a Changing World: Responding to Democratic Voices</i>	Menyetujui bahwa demokrasi sebagai katalisator perdamaian melalui penyelenggaraan dialog antar elemen masyarakat serta menyepakati kehadiran demokrasi dengan nilai-nilai dan

		budaya lokal serta praktik home grown democracy sebagai upaya efektif dalam menyelesaikan konflik internal
2011	<i>Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices</i>	Mendiskusikan bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang harus secara berkelanjutan mendukung kebebasan dan kesetaraan hak, terlepas dari apapun bentuk pemerintahannya.
2012	<i>Advancing Democratic Principles at The Global Setting: How Democratic Global Governance Contributes to International Peace and Security, Economic Development, and Effective Enjoyment of Human Rights</i>	Seluruh Masyarakat dan komunitas internasional harus menciptakan kondisi yang baik bagi perkembangan demokrasi dan bisa dimulai dari PBB dan organisasi regional dalam mendorong terciptanya penghormatan terhadap HAM sebagai Universal Values dan kondisi ekonomi serta keamanan yang dapat mendukung proses demokrasi di setiap negara
2013	<i>Consolidating Democracy in a Pluralistic Society</i>	Menyadari bahwa penerapan sistem multi partai dapat menjadi upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat yang plural serta pentingnya dalam melakukan penguatan institusi untuk menjaga keterlibatan seluruh aspirasi masyarakat
2014	<i>Evolving Regional Democratic</i>	Menyadari hubungan esensial antara politik, sebagai variable

	<i>Architecture: The Challenges of Political Development, Public Participation and Socio-Economic Progress in The 21<sup>st</sup> Century</i>	yang menentukan arah demokrasi, ekonomi sebagai aspek yang menentukan arah politik serta partisipasi publik yang menentukan tingkat kematangan demokrasi
2015	<i>Democracy and Effective Public Governance</i>	Demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif dapat mendorong pembangunan komprehensif dan holistic melalui pendekatan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum
2016	<i>Religion, Democracy and Pluralism</i>	Menyelesaikan permasalahan terhadap pemahaman agama, isu toleransi antarumat agama dan bangsa yang saat ini turut berpengaruh dalam perkembangan demokrasi di berbagai negara
2017	<i>Does Democracy Deliver ?</i>	Merefleksikan sepuluh tahun perjalanan BDF dengan pandangan bahwa demokrasi sebagai sebuah proses yang dinamis dan terus berlangsung serta menggarisbawahi inklusivitas sebagai kunci mewujudkan partisipasi dan kerukunan sosial yang akan mendorong kemajuan ekonomi, menjaga keamanan dan



		stabilitas, serta menghilangkan kesenjangan sosial
--	--	--

*Sumber: Diolah dari berbagai laporan BDF dan Kemlu*

Sebagai salah satu bentuk upaya *Constructive Engagement*, Bali Democracy Forum dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung dalam menopang upaya transisi demokrasi di Myanmar. Peran BDF tersebut selaras dengan tujuan dibentuknya forum pertemuan tersebut yaitu untuk mempromosikan demokrasi di Asia. Sedangkan di sisi lain Asia diketahui sebagai wilayah yang belum memanfaatkan potensi ekonomi dan politik secara maksimal dan berkelanjutan. Bagi banyak negara, ketika kondisi ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif, maka hal ini pun akan diikuti dengan perkembangan kondisi HAM, dan politik.

BDF diselenggarakan pertama kali pasca satu tahun Demonstrasi Saffron yang terjadi di Myanmar. Sebagai bentuk dari strategi kebijakan luar negeri Indonesia, kemunculan BDF juga digunakan oleh Myanmar untuk memajukan langkah demokrasi yang coba untuk dilakukan. Dengan hadirnya BDF, Myanmar menaruh harapan besar untuk dapat belajar terkait praktik demokrasi di berbagai negara. Pendekatan politik pemerintah Indonesia melalui BDF menunjukkan upaya konstruktif Indonesia dalam mempengaruhi Myanmar dan mendukung keberlangsungan demokrasi secara inklusif namun berhasil meyakinkan Myanmar untuk dapat menerima nilai demokrasi yang coba disampaikan melalui BDF. Sehingga ketika forum ini dikritik oleh berbagai pihak yang tidak setuju Myanmar diundang ke dalam forum tersebut. Pemerintah Indonesia di sisi lain justru

memberikan dukungannya terhadap partisipasi Myanmar karena pada dasarnya tujuan utama BDF ialah untuk mengikutsertakan Myanmar berpartisipasi dalam BDF dan menunjukkan proses *top-down* dalam upaya transisi demokrasi yang dilakukan oleh Myanmar.

Di samping itu BDF juga berperan dalam mendukung stabilitas regional guna terwujudnya semangat demokrasi di Asia. Seperti yang disampaikan oleh ketua delegasi Myanmar untuk BDF kedua U Maung Myint, ia mengungkapkan bahwa *“I wish to stress that democracy can only be established in an environment of peace and stability.. it is my belief that this 2<sup>nd</sup> Forum will also contribute to further promotion of democracy in the region”* . BDF secara tidak langsung berperan sebagai pendorong Myanmar untuk mengadopsi demokrasi melalui pendekatan berskala regional.

Sehingga dapat dikatakan bahwa peran BDF dapat secara efektif mempengaruhi transisi demokrasi di Myanmar juga dapat terjadi karena adanya inisiatif dari pihak rezim yang berkuasa di Myanmar untuk menerapkan langkah-langkah demokratisasi guna mewujudkan stabilitas negeri. Sementara itu jika dipahami lebih lanjut ide mengenai demokrasi pada hakikatnya tidak terlepas dari nilai-nilai yang diatur di dalam *Universal Declaration on Human Rights* 1948 yang meliputi indikator hak-hak fundamental yang membentuk demokrasi yaitu; hak politik dan hak sipil yang dapat diukur dari kemampuan negara menyelenggarakan pemilu yang adil dan berkelanjutan yang melibatkan pihak sipil dan media, kemudian indikator lainnya ialah hak asasi sosial, budaya dan ekonomi.

Secara garis besar BDF sebagai forum yang diselenggarakan pada tingkat multilateral mampu memberikan pengaruh positif terhadap proses demokrasi di Myanmar. Hal ini dapat terlihat dari keputusan Myanmar untuk ikut serta dalam BDF. Melalui partisipasi aktif yang dilakukan oleh Myanmar tersebut tentunya dapat merubah persepsi terhadap identitas Myanmar. Dimana akan terbentuk sebuah persepsi baru yaitu Myanmar sebagai negara demokrasi. Perubahan persepsi ini pada gilirannya akan berdampak terhadap hubungan Myanmar dan negara lain serta upaya rekonsiliasi dengan negara-negara Barat yang sempat memeberikan sanksi ekonomi terhadap Myanmar.

Selanjutnya pengaruh lain yang ditimbulkan oleh BDF ialah munculnya kesadaran antara para elit politik dan rezim militer di Myanmar akan pentingnya untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi. Hal ini terlihat dari keinginan Myanmar untuk bekerjasama dengan IPD dalam mendorong proses transisi demokrasi Myanmar. Seperti yang telah diketahui bahwa IPD merupakan lembaga lanjutan dari BDF yang bertujuan untuk merealisasikan ide-ide yang muncul dalam forum BDF dan membantu memecahkan problematika yang turut hadir dari dalam forum melalui beragam program kerja yang tepat. Dalam memberikan bantuan terhadap proses transisi demokrasi Myanmar IPD tidak menggunakan metode pemaksaan atau yang menuntut Myanmar untuk segera mengadopsi sistem demokrasi. IPD memiliki pandangan bahwa proses belajar dan memahami praktik demokrasi sangatlah penting dalam membangun demokrasi. Bentuk pendekatan dan metode ini lah yang membuat BDF dan IPD digemari oleh banyak pihak yang tertarik untuk ikut serta di dalamnya. Melalui BDF negara demokratis dan non

demokratis di pertemukan dalam satu forum yang sama dan masing-masing pihak dapat saling belajar mengenai praktik demokrasi dari negara-negara yang dinilai menjalankan praktik demokrasi dengan baik, negara-negara non demokratis ini kemudian akan dibantu oleh IPD dalam hal proses transisi (Rahman, 2017). Oleh karena itu BDF dapat dikatakan sebagai sebuah platform guna membantu proses pembuatan kesepakatan transisi demokrasi dan di sisi lain IPD kemudian menjadi institusi yang membantu dalam merealisasikan gagasan dan ide-ide yang terlahir dari forum BDF.

Salah satu bukti pencapaian IPD dalam membantu proses transisi demokrasi ialah, ketika IPD berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai negara yang bersedia turut berpartisipasi untuk mendukung demokrasi Myanmar. Seperti halnya pada tahun 2011, IPD bersama Norwegia dan Australia mengatur sebuah workshop dan mengajak Myanmar membahas mengenai berbagai langkah-langkah startegis dalam proses transisi demokirasi. Munculnya reaksi positif yang diikuti dengan keinginan Norwegia dan Australia untuk turut bekerjasama dengan IPD dalam mendukung demokrasi Myanmar menunjukkan bentuk kepercayaan kedua negara yang diperoleh melalui dialog konstruktif dan komunikasi BDF. Dalam hal ini IPD mampu menjadi fasilitator bagi negara-negara yang ingin mendukung proses transisi demokrasi Myanmar seperti Norwegia dan Australia serta mampu menjalin kerja sama yang baik dengan negara-negara tersebut. Sejak tahun 2012, Australia memberikan bantuan sebesar USD 1,7500,000 untuk membiayai akomodasi IPD hingga tahun 2015 dan bantuan sebesar AUD 140,000 untuk menyelenggarakan workshop di Yangoon, Myanmar. Kemudian di sisi lain Norwegia juga

memberikan bantuan sebesar NOK 1,800, 000 untuk membangun pusat stabilitas perdamaian dan demokrasi Myanmar (Institute For Peace and Democracy, 2012). sehingga dapat dikatakan bahwa IPD telah menjadi pihak ketiga yang mempertemukan negara yang bersedia membantu dan Myanmar.

**Tabel 2. Peran yang dijalankan oleh IPD dalam mendukung demokratisasi di Myanmar**

WAKTU	BENTUK PERAN IPD
November 2012	Melaksanakan FGD antara Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC) Bersama IPD di Bali yang membahas mengenai penguatan peran Lembaga negara dalam melangsungkan promosi atas HAM sebagai bagian dari langkah demokratisasi Myanmar dan diikuti dengan diadakannya Bali Media Forum keempat, IPD bersama partisipan lainnya dan dibantu oleh Thomson Foundation mendukung pengembangan pers, media dan jurnalistik di Myanmar
Juni 2013	IPD melakukan kunjungan serta FGD yang diadakan oleh MNHRC bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia di Yangoon yang membahas mengenai laporan HAM di Myanmar dan peran Indonesia dalam mendorong proses penegakan HAM di Myanmar
Februari 2014	IPD melaksanakan <i>Scooping Mission</i> melalui kunjungannya ke Myanmar yang menghasilkan tiga kesepakatan bersama <i>Myanmar Institute for Social and International Studies</i> (MSIS) mengenai proses transisi politik, yang meliputi; Kunjungan yang diadakan Myanmar untuk menyaksikan proses pemilu yang terjadi di Indonesia serta bentuk dukungan dan bantuan terhadap pemilu Myanmar 2015 dan diikuti dengan

	mendukung diadakannya interfaith dialogue antara Islam-Buddha.
April 2014	IPD mengundang Myanmar untuk melihat proses pemilu DPR dan DPRD yang dilaksanakan di Bali. Hal ini bertujuan untuk mengajak Myanmar menyaksikan dan belajar dari seluruh proses pemilu di Indonesia yang meliputi penghitungan suara, perdebatannya, hingga bagaimana setiap pemilih dapat melindungi kerahasiannya Selanjutnya IPD juga bekerjasama dengan Asean Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) mengadakan sebuah symposium yang mengangkat topik mengenai perdamaian dan rekonsiliasi. Dimana pada symposium ini Myanmar juga turut berpartisipasi sebagai negara peserta
Juli 2014	Sebanyak 30 delegasi dari Myanmar Development Resource Institute (MDRI) dan Myanmar Center for Strategic and International Studies (CSIS) melakukan kunjungan ke Indonesia untuk melihat proses pemilu presiden

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Freedom House mencatat bahwa sejak kemunculan BDF dan IPD terdapat kenaikan angka tren positif transisi demokrasi Myanmar tepatnya pada indeks demokrasi yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 21-24 poin pada tahun 2012-2014. Walaupun sepenuhnya tidak dapat dikatakan bahwa kenaikan indeks ini disebabkan oleh kehadiran BDF dan IPD namun partisipasi aktif yang dilakukan oleh BDF dan IPD dalam membantu proses transisi demokrasi Myanmar turut menjadi faktor pendukung dalam peningkatan indeks tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Freedom House menunjukkan terdapat

perbaikan pada aspek hak politik dan hak sipil seperti pemilu dan kebebasan sipil yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 6 dan 5 poin (Puddington, 2013)

Namun dalam penelitian ini Freedom House juga menunjukkan tantangan besar lainnya yang dihadapi dalam upaya transisi demokrasi Myanmar. Yaitu, kearifan lokal dimana hampir 90% masyarakat Myanmar menganut agama Buddha. Berdasarkan data dari Asian Barometer Survey (ABS) pada tahun 2015, sebanyak 95% masyarakat Myanmar meyakini jika semakin banyak kepercayaan dalam negeri maka akan berdampak pada munculnya kekacauan. Hal ini tentunya menunjukkan tingginya angka anti-pluralisme dalam Myanmar. Sehingga tak ayal apabila etnis mayoritas seperti Buddha menganggap bahwa kehadiran agama lain selain Buddha seperti Islam dan agama lainnya akan menjadi hambatan bagi agama mereka. Buddha yang menjadi agama mayoritas telah berakulturasi dengan konteks sosial-budaya dan membentuk kearifan lokal dengan aliran Theravada yang dimilikinya. Seperti yang telah diketahui bahwa ajaran Theravada Buddhism menjadi salah satu kunci munculnya isu domestik dan tantangan dalam proses transisi demokrasi. Dapat diketahui bahwa aspek pendidikan sosial, budaya dan keagamaan menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam menangani paham anti-pluralisme.

Dalam hal ini peran IPD dalam berpartisipasi untuk menyelesaikan isu ini terlihat dari upaya IPD menyelenggarakan *interfaith dialogue* guna menumbuhkan pemahaman keagamaan yang bersifat moderat, sehingga kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat mampu merekonstruksi pemahaman akan demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung di

dalamnya. Selain itu sebagai bagian dalam upaya untuk mendukung transisi demokrasi dalam masyarakat Myanmar, IPD yang turut memperhatikan pentingnya untuk menyebarkan demokrasi di kalangan *grass root*. Peran IPD dalam hal ini terlihat melalui pelatihan yang dilaksanakan dengan seluruh elemen sipil adalah dirasa cukup efektif untuk membantu menumbuhkan kesadaran akan demokrasi secara *bottom-up* guna mewujudkan demokrasi substansial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam praktiknya.

## 2) **Meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia-Myanmar**

Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang potensial dengan Myanmar, hal ini juga tentunya didukung dengan pertimbangan pemerintah Indonesia yang melihat pentingnya untuk menggabungkan *developmental approach* melalui berbagai kerja sama dalam bidang ekonomi untuk mendukung transisi politik di Myanmar, sebab seperti yang telah diketahui strategi *Constructive Engagement* yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia menekankan pada penggunaan pendekatan konstruktif yang melibatkan aspek ekonomi ke dalam upaya perubahan politik. Pemerintah Indonesia melihat potensi kerja sama ekonomi yang dapat dilakukan dengan Myanmar guna mewujudkan kepentingan nasional Indonesia terutama dalam mendukung keberlangsungan proses demokrasi di Myanmar. Oleh sebab itu sejak tahun 2011-2017 pemerintah Indonesia telah secara intensif mempererat hubungan ekonomi dengan Myanmar melalui berbagai bentuk kesepakatan kerja sama bilateral.

### a) ***Kerjasama Ekonomi Melalui Joint Commission between the Republic of Indonesia and the Union of Myanmar***



Pertemuan Joint Commission between Indonesia and Myanmar pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007 di Jakarta, Indonesia. Joint Commission ini merupakan lanjutan dari MoU antara Indonesia dan Myanmar dalam mendirikan *Joint Commission for Bilateral Cooperation* yang ditanda tangani oleh Menteri Luar Negeri, Dr. N. Hassan Wirajuda dan Menteri Luar negeri Myanmar, U Nyan Win, selama kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Yangon, Myanmar, pada 2006. Joint Commission ini merupakan sebuah awal baru bagi kerja sama bilateral kedua negara yang membuka peluang pertumbuhan tren positif ekonomi di kedua negara terutama bagi Myanmar selama proses transisi politik yang dilakukan. (Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, 2007). Selanjutnya pada tahun 2011 kembali diadakan pertemuan JCBC kedua, dan dipertemuan kali ini kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan nilai perdagangan sebesar USD 500 juta pada tahun 2015. Joint Commission ini memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk melihat kembali hubungan bilateral dan kemudian merancang roadmap untuk menandatangani kesepakatan kerja sama. Pada pertemuan ini juga pemerintah Indonesia kembali menekankan kesiapannya dalam membentuk kerja sama yang kuat dengan Myanmar dalam hubungannya dengan mendorong upaya demokratisasi Myanmar serta pada kesempatan ini pula Indonesia menawarkan bantuan dalam upaya mewujudkan demokrasi dan *good governance* di Myanmar. Dalam mewujudkan upaya tersebut pemerintah Indonesia akan mengerahkan berbagai lembaga dan institusi dalam

negeri untuk terlibat langsung dalam memberikan bantuan terhadap Myanmar, seperti melalui mengundang institusi terkait di Myanmar untuk ikut serta dalam mengembangkan kerjasama dengan KPU, Komnas HAM dan LIPI.

Hal ini tentunya dapat diartikan sebagai strategi pemerintah Indonesia dalam membagikan pengalamannya dalam melaksanakan proses demokrasi pada masa transisi politik. Sementara itu kerjasama antara Indonesia dan Myanmar juga akan diperluas ke berbagai aspek seperti pertahanan dan keamanan, dimana kedua negara juga membicarakan kerjasama mengenai pertukaran informasi dan upaya peningkatan kapasitas antar institusi berbasis militer serta kepolisian kedua negara. Di sisi lain berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan pemerintah Myanmar tentunya bertujuan untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia dalam mendukung demoratisasi di Myanmar melalui pemanfaatan berbagai elemen kerjasama bilateral yang mencakup bidang ekonomi, politik dan keamanan. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa pengalaman Indonesia dalam melakukan transisi politik pada era reformasi dapat mendukung pencapaian target kerja sama kedua negara terutama dengan melihat kesamaan sejarah transisi politik yang membuka potensi kolaborasi kedua negara dalam hal mempromosikan good governance, demokrasi dan HAM. (Than, 2012)

Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Myanmar melalui JCBC kemudian terus mengalami perkembangan dengan diadakannya pertemuan JCBC ketiga tingkat Menteri yang diselenggarakan pada 12 Juni 2013 di Nusa Dua

Bali. Dalam pertemuan kali ini Indonesia yang di wakili oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Myanmar yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Wunna Maung Lwin mendiskusikan mengenai rencana untuk mempererat hubungan kerja sama dalam memajukan nilai-nilai demokrasi terutama dalam hal pembangunan kapasitas, resolusi konflik komunal dan pembangunan sosial-ekonomi, investasi dan perdagangan; energy dan keamanan pangan; begitu juga dengan mobilisasi penduduk kedua negara. (Post, 2013)

Kerja sama Capacity Building antara Indonesia-Myanmar diperkuat kembali dengan diartikulasikannya dan dimulainya “Blue Book on Indonesia-Myanmar Capacity Building Partnership 2013-2015”, dimana buku ini berisi mengenai berbagai program kerja sama dalam meningkatkan kapasitas di berbagai area yang didedikasikan untuk Myanmar dalam kurun waktu 2013-2015. Selain itu kedua Menteri Luar negeri dari dua negara tersebut juga sepakat untuk kembali mendorong pencapaian target perdagangan senilai USD 1 miliar pada tahun 2016 serta untuk meningkatkan nilai investasi antara Indonesia dan Myanmar (Anantara, 2013). Seperti yang diketahui bahwa nilai perdagangan antara Indonesia-Myanmar mencapai USD 465 juta, dimana mengalami peningkatan sebesar 7,98% dari tahun 2011 yang hanya mencapai USD 430,7 juta. Sedangkan di bidang investasi sendiri, nilai investasi Indonesia sampai dengan tahun 2012 mencapai USD 241,5 juta yang membuat Indonesia berada di posisi ke-14 dan selanjutnya diprediksi akan mengalami peningkatan seiring dengan menguatnya minat perluasan usaha korporasi

Indonesia ke Myanmar. Kemudian mengikuti pertemuan JCBC

Sebelumnya pertemuan ketiga JCBC ini mengikuti penandatanganan perjanjian tiga kerjasama ekonomi yang dilakukan di Myanmar oleh Presiden Myanmar U Thein Sein dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan April. Dokumen yang ditandatangani oleh dua kepala negara tersebut meliputi *Framework agreement on trade and investment between The Ministry of trade of the Republic of Indonesia and The Ministry of National Planning and Economic Development of the Republic of The Union of Myanmar* dan dua *memoranda of understanding on cooperation in human resource and on rice trade* (Xinhua, 2013). Selanjutnya pada tahun 2015 di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, perjanjian ekonomi ini kemudian di ratifikasi ke peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2015 (RI, 2015).

Upaya ini kemudian menunjukkan keseriusan dan keberlanjutan langkah pemerintah Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah Myanmar dalam rangka mewujudkan agenda kepentingan nasional yang telah dimulai dari masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut hingga masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Komitmen untuk terus melanjutkan agenda politik luar negeri yang berkaitan dengan mewujudkan demokrasi di Myanmar masih dapat terlihat dalam pemerintahan Presiden Jokowi melalui kebijakan politik luar negeri yang mengandung strategi *Constructive Engagement* dalam penerapannya.

**b) Mengadakan Diskusi Antara Para Pengusaha Indonesia-Myanmar Melalui Event Business Matching**

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi Pemerintah Indonesia melalui KBRI Yangon bekerjasama dengan Kadin Myanmar untuk menyelenggarakan sebuah acara yang dikenal sebagai Business Matching pada tahun 2017. Dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah investasi dan perdagangan kedua negara, forum ini kemudian mengundang 50 pengusaha dari 33 perusahaan Indonesia serta 50 pengusaha dari Myanmar untuk mendiskusikan topik dari berbagai aspek seperti energi solar, batubara, obat-obatan farmasi, listrik, daging dan susu, komoditas, baju dan textile, kerajinan tangan, kopi, the hingga makanan tradisional dari Indonesia. (Soe, 2017)

Melalui forum ini Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan kesempatan bagi pengusaha dan perusahaan dari kedua negara untuk saling mempromosikan produknya, bernegosiasi atas masing-masing produknya dan saling melakukan export produk tersebut. Bahkan sebagian dari pengusaha Indonesia kemudian memutuskan untuk melakukan investasi di Myanmar dan membangun perusahaan di negara tersebut. Pada kesempatan ini pula Pemerintah Indonesia kembali menekankan rencananya untuk melakukan investasi pada sektor pertambangan, teknologi dan informasi serta infrastruktur. Mengingat peningkatan nilai perdagangan antara Indonesia-Myanmar pada tahun 2017 yang mencapai USD 973 juta. (KEMLU RI, 2018).

Dalam Forum ini Deputi Kementerian Perdagangan Myanmar U Aung Htoo juga menyampaikan kepada para pelaku usaha di Myanmar untuk meniru kesuksesan bisnis Indonesia, sehingga forum ini juga dijadikan sebagai kesempatan bagi para pengusaha Myanmar untuk belajar dan bertukar informasi serta pengalaman dengan pengusaha Indonesia. Forum ini juga diyakini sebagai sebuah upaya Pemerintah Indonesia untuk membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi di Myanmar melalui perkembangan bisnis dari para pengusaha dalam negeri.

### **3) Menerapkan Diplomasi Kemanusiaan dalam mendukung penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar**

Krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Rakhine State, Myanmar telah berkembang menjadi salah satu krisis yang paling kompleks. Indonesia sebagai negara yang telah berkomitmen untuk mempromosikan nilai-nilai HAM seiring dengan mendukung perwujudan demokrasi di Myanmar menunjukkan kontribusinya dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan yang menimpa muslim minoritas Rohingya di Myanmar. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim dan terbesar di wilayah Asia Tenggara dituntut untuk secara efektif memberikan partisipasi aktif dalam menanggapi konflik kemanusiaan terbesar di kawasan. Krisis ini juga tentunya telah menarik perhatian komunitas internasional untuk turut terlibat dalam penyelesaiannya, seperti halnya ASEAN. Namun dalam hal ini organisasi di kawasan Asia Tenggara tersebut tidak mampu untuk terlibat jauh dan secara efektif mendorong menyelesaikan konflik kemanusiaan Myanmar akibat

prinsip non intervensi yang menjadi penghalang bagi ASEAN untuk menindaklanjuti krisis tersebut. Namun bagi Indonesia terlepas dari prinsip non intervensi tersebut, Indonesia melalui startegi pendekatan konstruktifnya terus berusaha untuk menegakkan HAM di Myanmar.

Seperti yang diketahui, Indonesia telah menunjukkan kesediaannya dalam menggelar dukungan lebih luas dari komunitas Internasional selain ASEAN dalam menangani konflik di Myanmar salah satunya seperti yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa pada tahun 2012 dengan memperkenalkan diplomasi moral, melalui strategi diplomasi ini Marty mengajak Organization of the Islamic Conference (OIC) untuk mengambil tindakan dan membantu menghentikan operasi berdarah di Rakhine, sebagai hasilnya pertemuan yang dilakukan di Mekkah, Saudi Arabia tersebut telah memutuskan untuk membawa isu krisis kemanusiaan Rohingya di hadapan majelis umum PBB dengan mempertimbangkan penderitaan yang dialami oleh muslim Rohingya dalam menghadapi kekerasan oleh pihak otoritas Myanmar dan penolakan pemerintah dalam mengakui kewarganegaraan penduduk Rohingya (Hunt, 2012)

Segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyikapi krisis Rohingya terus berlanjut hingga pada akhir Agustus tahun 2017 ketika krisis kemanusiaan ini kembali pecah dan menyebabkan 671,000 penduduk muslim Rohingya harus meninggalkan Myanmar untuk menyelamatkan diri dari operasi pembersihan etnis yang dilakukan oleh otoritas Myanmar (Watch, 2017). Terus berlanjutnya peristiwa pelanggaran HAM dan nilai-nilai demokrasi yang terjadi di Myanmar terutama

menyangkut krisis kemanusiaan minoritas muslim Rohingya membuat pemerintah RI terus berkomitmen untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine State melalui kerjasama dengan berbagai kekuatan civil society di Indonesia dan komunitas internasional. Dalam hal ini Indonesia terus meminta dukungan dari negara-negara anggota OIC untuk terlibat dalam pendekatan konstruktif seperti yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani krisis kemanusiaan Rohingya dan mengundang organisasi internasional OIC untuk segera memberi bantuan dalam menolong seluruh penduduk di Rakhine State dan mendorong seluruh pihak di Myanmar untuk menyelesaikan akar permasalahan dari situasi yang dihadapi oleh penduduk Rohingya. (Indonesia M. O., 2017) hal ini disampaikan oleh Indonesia melalui pertemuan contact group OIC pada sidang umum ke 72 PBB di New York tahun 2017. Pada kesempatan ini Indonesia yang diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Pemerintah Myanmar untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State, Pemerintah RI juga kembali menegaskan pentingnya untuk melindungi dan menghormati HAM semua komunitas, termasuk komunitas muslim di Myanmar. (Indonesia M. O., Ministry Of Foreign Affairs Republic Of Indonesia, 2017). Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia ini tidak terlepas dari tujuan politik luar negeri Indonesia untuk mempromosikan HAM dan memastikan keberlangsungan penerapan nilai-nilai demokrasi di Myanmar, dengan munculnya krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, hal ini dinilai dapat menghambat proses demokratisasi yang berlangsung di Myanmar dan mendorong munculnya asumsi buruk mengenai kepemimpinan pemerintah Myanmar atas



kegagalannya dalam melindungi hak etnis minoritas dan menjaga keamanan domestik.

Di sisi lain upaya Pemerintah Myanmar untuk melakukan pembangunan nasional tidak dapat terwujud apabila Pemerintah tidak dapat mengatasi isu kemanusiaan yang telah menarik perhatian komunitas internasional. Oleh sebab itu Indonesia sebagai salah satu negara yang sejak awal telah berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi di Myanmar harus dapat menunjukkan kontribusi aktifnya dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan Rohingya dan memastikan konflik ini tidak menghentikan langkah demokratisasi di Myanmar. Keterlibatan Indonesia sebagai salah satu pihak yang secara aktif menggelar dukungan dan bantuan terhadap krisis kemanusiaan di Rohingya juga dapat dikarenakan oleh kepentingan Indonesia dalam mempertahankan stabilitas kawasan dari dampak yang diakibatkan oleh meningkatnya arus jumlah pengungsi penduduk Rohingya. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia terus mendesak Pemerintah Myanmar untuk dapat segera menyelesaikan masalah tersebut. Menganggapi situasi yang memburuk di Rakhine State, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah yang dibutuhkan dalam menyelesaikan krisis Rohingya. Upaya pemerintah Indonesia melalui diplomasi kemanusiaan mulai membuahkan hasil dengan diterimanya bantuan dari Indonesia oleh Pemerintah Myanmar dan menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang berkesempatan mendistribusikan bantuan ke dalam negeri tersebut. Sebagai tindak lanjut dari bagian rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar dan kondisi di lapangan, pada Agustus 2017, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meluncurkan sebuah Program Humanitarian Assistance for Sustainable Community

(HASCO) kepada Myanmar. Program ini merupakan bentuk komitmen dari 11 LSM yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) program ini memiliki tujuan utama yakni, memberikan bantuan jangka menengah serta panjang untuk penduduk Myanmar secara inklusif, khususnya yang berada di wilayah Rakhine State.

Terdapat 4 program utama yang diluncurkan meliputi; pendidikan, kesehatan, ekonomi dan *capacity building*. Program tersebut secara keseluruhan bernilai US\$ 2 juta yang berasal dari jumlah donasi yang digalang oleh masyarakat Indonesia. Langkah diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia kemudian berlanjut hingga lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu dengan Kounselor Myanmar Aung San Suu Kyi pada 4 September 2017. Dalam pertemuannya dengan Suu Kyi, Pemerintah RI melalui Menteri Retno Marsudi menyampaikan usulan Formula 4+1 untuk diterapkan terhadap krisis di Rakhine State. Formulai ini mengandung empat elemen utama yang meliputi: 1. Mengembalikan stabilitas dan keamanan; 2. Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan tindakan kekerasan; 3. Perlindungan terhadap semua orang yang berada di wilayah Rakhine State, tanpa memandang dari latar belakang suku dan agama; dan 4. Pentingnya segera membuka akses untuk bantuan kemanusiaan. Serta satu elemen tambahan yaitu implementasi dari rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan. Misi diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia juga berhasil mencapai pencapaian penting lainnya dengan disepakatinya bukan hanya Indonesia melainkan juga ASEAN untuk terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. (Indonesia M. O., 2017)